



**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN AKSELERASI FISIP UNIVERSITAS ANDALAS**

SKEMA PENELITIAN : PENELITIAN DASAR KEILMUAN

JUDUL PENELITIAN

***PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19***

TIM PENGUSUL

Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si NIDN : 0028108109	(Ketua Peneliti)
Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si NIDN : 0014058601	(Anggota)
Didi Rahmadi, S.Sos.,MA	(Anggota)
Andre Gunawan No. Bp 1710832010	(Anggota)
Tika Yuniarty No.Bp 1710832016	(Anggota)

**Nomor Kontrak Penelitian : 01/PL/SPK/PNP/FISIP-Unand/2020 Tanggal 1 September
2020**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

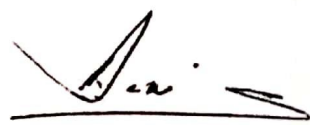
**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN AKSELERASI FISIP TAHUN 2020**

1.	Judul Penelitian	:	PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
2.	Skim	:	Penelitian Dasar Keilmuan
3.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
	b. NIDN	:	0028108109
	c. Jabatan Fungsional	:	Lektor
	d. ID Sinta	:	6658081
	e. ID Google Scholar	:	https://scholar.google.co.is/citations?user=7MKPe4AAAJhl=id
	f. Program Studi	:	Ilmu Politik
	g. Nomor HP	:	085271811756
	h. Alamat email	:	dewianggraini_81@yahoo.com dewianggraini@soc.unand.ac.id
	Anggota Peneliti 1	:	
	a. Nama Lengkap	:	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si
	b. NIDN	:	0014058601
	c. Program Studi	:	Administrasi Publik
	Anggota Peneliti 2	:	
	a. Nama Lengkap	:	Didi Rahmadi, S.Sos.,M.A
	b. NIDN	:	-
	c. Program Studi	:	Ilmu Politik
	Anggota Mahasiswa 1	:	
	a. Nama Lengkap	:	Andre Gunawan
	b. No. Bp	:	1710832010
	c. Prodi	:	Ilmu Politik
	Anggota Mahasiswa 2	:	
	a. Nama Lengkap	:	Tika Yuniarty
	b. Program Studi	:	Ilmu Politik
	c. No. BP	:	1710832016
4.	Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp.15.000.000,-

Mengetahui :

 Sekretaris Jurusan
Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
 NIP. 198110282010122004

Padang, 22 November 2020
 Ketua Pengusul,


Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
 NIP. 198110282010122004

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : ***PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19***

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Prodi	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si	Ketua	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	Jurusan Ilmu Politik/FISIP	15 Jam
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	Anggota	Administasi Publik	Prodi Administrasi Publik/FISIP	12 Jam
3	Didi Rahmadi,MA	Anggota	Ilmu Politik	Ilmu Politik/FISIP	12 Jam
3	Andre Gunawan	Anggota	Ilmu Politik	Jurusan Ilmu Politik	10 Jam
4	Tika Yanuarty	Anggota	Ilmu Politik	Jurusan Ilmu Politik	10 Jam

1. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Implementasi Good Governance di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian tahun ke-1 yang peneliti lakukan terkait dengan *roadmap* penelitian peneliti. Adapun topik penelitain ini adalah *Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19*. Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk pembuatan draf bahan ajar peneliti dengan judul “Pengembangan *E Government* di Sumatera Barat”

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Juli tahun: 2020

Berakhir : Bulan November tahun 2020

5. Usulan Biaya ke FISIP Unand : **Rp. 15.000.000**

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Produk temuan yang ditargetkan

- Diketuinya respon Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19
- Diketuinya bentuk pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19 di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Diketuinya peluang dan kendala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan Pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)
Adanya inovasi pengembangan layanan *e-government* di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi covid-19
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
Jurnal Analisis Politik Tahun 2021 atau Jurnal Pembangunan Nagari tahun 2021
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Urgensi Penelitian	10
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. <i>State of Art</i>	13
2.2. Penelitian yang telah dilaksanakan	17
2.3. Road Map Penelitian	14
2.2. Kerangka Teoritis	19
2.2.1. Konsep Good Governance	19
2.2.2. Konsep E Government	20
BAB 3. METODE PENELITIAN	22
3.1. Tahapan Penelitian	22
3.2. Jenis Penelitian	29
3.3. Unit Analisis	22
3.4. Lokasi Penelitian	22
3.5. Teknik Pemilihan Informan	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	23
3.7. Teknik Analisa Data	24
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	24

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	25
4.1. Anggaran Biaya	25
4.2. Jadwal Penelitian	25

BAB 5. HASIL PENELITIAN	27
--------------------------------	-----------

BAB 6. PENUTUP	32
6.1. Kesimpulan	32
6.2. Saran	32

REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Justifikasi Anggaran Penelitian
2. Susunan Organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

RINGKASAN

E-Governamnet merupakan salah satu implementasi dari *good governance*. Tujuan diterapkannya *e-government* adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *E-government* adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merespon penerapan *e-governamnet* dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada 4 (empat) tahapan pelaksanaan *e-government* yaitu tahap persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Kondisi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum terjadinya wabah covid-19 masih berada pada posisi tahap 2 (dua) yakni pematangan dan dalam proses tahap 3 (tiga) yakni pemantapan. Akan tetapi setelah wabah covid melanda Indonesia tentu seharusnya Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus cepat melakukan terobosan untuk mengoptimalkan perkembangan layanan *e-governamnet* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pandemi covid-19 ini menyebar dengan sangat cepat melalui interaksi langsung sesama masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan respon, bentuk pengembangan, peluang dan kendala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposiv sampling*. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa respon yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar dalam pengembangan layanan e governamnet masa pandemi covid 19, yaitu : dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang AKB, adanya program OnSmart berbasis android, program Command Center. Ada beberapa kendala juga dalam pengembangan layanan e government, yaitu : minimnya pembangunan infrastruktur IT, kualitas SDM aparatur dalam pengoperasian IT masih rendah, alokasi anggaran untuk pengembangan IT juga masih rendah, belum maksimalnya integrasi sistem antar OPD

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era industri 4.0 ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan penting untuk efisiensi dan kecepatan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terlebih dengan adanya otonomi daerah, di mana aspek pentingnya adalah mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud nyata dari *good governance* dalam bidang teknologi informasi adalah apa yang disebut dengan *e-government (e-gov)*. Melalui *e-gov* pula diharapkan peningkatan pelayanan publik dapat terwujud dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun produk *e-gov* ini dalam bidang pelayanan publik disebut dengan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*) atau sistem pelayanan instansi yang berbasis online.

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *e-government* adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Melalui instruksi presiden tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan kepada pejabat pemerintahan di daerah untuk mengambil langkah-langkah demi terlaksananya *e-government* secara nasional. Pemerintah daerah merespon instruksi presiden tersebut dengan mengeluarkan produk *e-government*, seperti pembuatan web pemerintahan daerah dengan segala dinamikanya.

Pengembangan *e-government* di daerah a pada saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja. Sehingga jika suatu pemerintah daerah telah memiliki website, muncul anggapan telah menerapkan aplikasi *e-government*. Padahal konsep *e government*, tidak saja menampilkan informasi pemerintah melalui layanan website saja, melainkan terjadinya transformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh *stakeholder* yang semula menggunakan media konvensional beralih menggunakan teknologi informasi¹

Provinsi Sumatera Barat juga merespon implementasi *e-government* dengan mengeluarkan Perda Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman

¹ Joko Tri Nugraha, 2018. *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan e-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media Volume 2 Nomor 1 April 2018

yang semakin maju, dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Merujuk kepada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dan NAWA CITA Kedua yaitu “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel “ posisi *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berada pada posisi tahap 2 (dua) yakni pematangan dan dalam proses tahap 3 (tiga) yakni pematapan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentunya akan segera mengembangkan *e-governmentnya* ke tahapan yang lebih tinggi ke tahap 4 (empat) yakni pemanfaatan².

Belum selesai tahapan yang dilakukan oleh Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-government* nya, pada saat ini terjadi pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia, di mana wabah ini pertama kali muncul di Wulan Cina Desember 2019 dan di Indonesia sendiri terdeteksi secara resmi pada awal Maret 2020. Ada negara yang berhasil mengendalikan penyebaran wabah tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan, ada yang memberlakukan lockdown, isolasi wilayah dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara yang juga terdampak pandemi covid juga melakukan langkah-langkah pencegahan, di Indonesia dikenal dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan per daerah di seluruh wilayah Indonesia. Terlepas dari respon kebijakan yang dilakukan berbagai negara dalam mengendalikan wabah ini, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pandemi ini tentu saja banyak berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Salah satu dampak yang sangat penting terjadi di Indonesia dalam bidang pelayanan publik. Di mana selama ini pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah adalah pelayanan konvensional dengan interaksi langsung yang intens antara masyarakat dengan pemerintahan, walaupun sudah ada juga pelayanan yang berbasis online. Dengan begitu cepatnya penularan covid-19 melalui interaksi secara langsung antarsesama individu, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintahan, terutama pemerintahan daerah harus merubah total mindset pelayanan dari yang sebelumnya masih konvensional harus beralih kepada pelayanan online secara maksimal.

Tentu dengan kondisi ini, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar harus memiliki inovasi dan terobosan untuk memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat, sehingga covid tidak menjadi alasan untuk tidak diberikannya pelayanan secara maksimal

² Penjelasan Perda No.20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

kepada masyarakat. Untuk saat ini Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki web yaitu www.sumbarprov.go.id dan beberapa situs web OPD yang berada dilingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Semenjak Bulan April-Juni 2020, dari data Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat ada 196 pengaduan masyarakat terkait layanan publik akibat terdampak covid 19, mulai dari keluhan dugaan maladministrasi, tidak memberikan pelayanan hingga penyimpangan prosedur³. Banyaknya pengaduan tersebut merupakan kepedulian masyarakat akan hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintahan, sekalipun pada pandemi covid 19 ini.

Walaupun ada pembatasan akibat pandemi covid 19 ini, akan tetapi pelayanan kepada masyarakat tentu tidak boleh menjadi terabaikan. Dalam kondisi ini, informasi yang aktual dan faktual sangatlah dibutuhkan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promotif, informatif, preventif maupun kuratif. Informasi tersebut dapat dipublikasikan kepada masyarakat dengan cepat dan efisien oleh pemerintah dengan menggunakan *e-governmnet*. Dan tentu saja kita berharap bahwa dengan adanya pandemi covid 19 ini pemerintahan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai terobosan dalam pengembangan layanan *e-government* kepada masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

Sampai hari Jumat, 24 Juni 2020 sudah 95.418 orang yang positif covid di Indonesia⁴. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri di hari dan tanggal yang sama sudah sebanyak 852 warga Sumbar yang positif covid 19⁵. Sebelum mewabahnya pandemi covid-19 di Daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengikuti PeGI sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 23 dari 25 peserta, tahun 2012 pada peringkat 14 dari 30 peserta, pada tahun 2014 peringkat 16 dari 22 peserta dan pada tahun 2015 peringkat ke 15 dari 20 peserta. Terlihat dari hasil tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berada diposisi belum maksimal. Dalam penilaiannya, para asesor mengkritisi satu poin penting yaitu tentang keberadaan institusi yang menjadi koordinator pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di

³ Ombudsman.go.id

⁴ <https://nasional.kompas.com>

⁵ <https://padang.tribunnews.com>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini dinilai fungsi koordinator teknologi, informasi, dan komunikasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan baik, belum memiliki rencana umum pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dampak lain dari belum berjalannya koordinasi teknologi, informasi, dan komunikasi dengan baik adalah pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan secara parsial pada beberapa Perangkat Daerah, sinkronisasi teknologi, informasi, dan komunikasi belum maksimal dan kurangnya tenaga sumber daya manusia bidang informatika dan teknologi⁶

Dengan adanya pandemi covid-19 ini kita berharap bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki strategi dan inovasi untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, tentu banyak hal yang mesti dipersiapkan, misal kesiapan sarana prasarana, sumber daya manusia yang akan mengelola, termasuk juga menyiapkan masyarakat yang akan melakukan pelayanan publik, dan yang paling penting juga menyiapkan perangkat untuk memarger pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya berbentuk konvensional menjadi berbasis online/web

Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti merumuskan penelitiannya sebagai berikut: Bagaimana pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat ? Adakah Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat merespon wabah pandemi covid 19 dengan membuat inovasi baru dalam pengembangan layanan *e-government* kepada masyarakat

1.3. Tujuan penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Menjelaskan respon Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19
- b. Menjelaskan bentuk pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19 di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- c. Menjelaskan peluang dan kendala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid-19

⁶ <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/3187>

1.4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk melihat seberapa cepat Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat merespon tuntutan untuk mengembangkan layanan *e-government* kepada masyarakat ditengah pandemi covid-19 ini
2. Untuk melihat bentuk pengembangan layanan *e-government* yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah provinsi Sumatera Barat ditengah pandemi covid-19 ini
3. Hasil penelitian ini juga diharapkn bisa mengidentifikasi peluang dan kendala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat di tengah pandemi covid-19 ini

1.5. Rencana Induk Dan Peta Jalan Penelitian Universitas Andalas

Penelitian ini merupakan penelitian pertama peneliti dalam kajian *good governance* dan *e-government* dalam masa pandemi covid 19. Penelitian yang berhubungan dengan tema ini akan peneliti lakukan dalam tiga tahun penelitian. Tahun pertama dengan topik “Pengembangan layanan *e government* pada masa pandemi covid-19 di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat”. Tahun kedua dengan topik “pengembangan layanan *e-government* di nagari-nagari di Sumatera Barat. Penelitian tahun ketiga dengan topik “Model pengembangan layanan *e-government* pada masa pandemi covid 19”.

Hasil dan luaran riset ini diharapkan mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Andalas, terutama dalam pengembangan tema penelitian terkait dengan hukum, politik dan *civil society*. Secara khusus luaran penelitian ini akan berguna pengembangan system politik Indonesia terutama dalam implementasi kebijakan desentralisasi politik agraria dan lingkungan. Tabel di bawah ini akan menjelaskan luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian ini akan dilakukan.

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Wajib	Tambahan	Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori			TS 1	TS 2	TS 3
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	<i>Submitted article</i> Internasional Terindeks/nasional sinta	V		V		
2	Artikel dimuat di prosiding			V	V		
3	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah	Nasional		V		V	
4	Draf Bahan Ajar		V	V			

Adapun tahun-tahun sebelumnya peneliti lebih banyak meneliti tentang “Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Ada beberapa penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan politik pengelolaan sumber daya alam, yaitu : *Pertama*, Penelitian tahun 2016 tentang Optimalisasi penerapan politik pengelolaan sumber daya alam terhadap potensi konflik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yang telah dimuat dalam Proceeding Seminar Nasional II FISIP Unand ISBN : 978-602-71540-6-3. *Kedua*, Penelitian tahun 2016 tentang Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dipresentasikan pada Semnas III FISIP tanggal 10 Mei 2017. *Ketiga*, Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan *Good Mining Practice* Di Provinsi Sumatera Barat yang telah dimuat dalam Jurnal Pembangunan Nagari Balitbag Provinsi Sumatera Barat ISSN : 2527-6387 (online) Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 dan sudah dipresentasikan pada Seminar Internasional ICCE (*international Conference on Civic Education*) tanggal 2-5 Oktober 2017. *Keempat*, Penerapan *Good Mining Practice* Pada Pertambangan Emas PT. Inexo Jaya Makmur (IJM) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan IV pada Bulan Desember 2018 dan sudah di akan dimuat dalam e-proceeding FISIP Reseach Day tahun 2019. *Kelima*, Pola Kekerasana Dalam Konflik-Konflik Pertambangan di Sumatera Barat (Studi Kabupaten Solok dan Pasaman). Sudah dipresentasikan pada Konferensi Internasional IC-ASEAN dan juga sudah

dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan V Pada Bulan Desember 2019.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *State of the art*

Pada dasarnya penelitian ini termasuk pada kajian-kajian mengenai Good Governace yang dihubungkan dengan pandemi covid 19

Dari penelusuran peneliti, sejauh ini belum ada penelitian mengenai penerapan e-governemnt pada masa pandemi covid, yang ada itu penelitian terkait dengan good governance khususnya e-government secara umum, yaitu :

Tabel 2. *State of Art* Penelitian

No	Nama Peneliti/Judul	Pembahasan
1.	Yuhfizar dengan judul : Penerapan e-government di Provinsi Sumatera Barat (Jurnal POLI REKAYASA, volume 5,Nomor 2, Maret 2010	E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ujung tombak dari penerapan e-government ini adalah tersedianya situs web pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 37 situs resmi pemerintahan provinsi Sumatera Barat, ada beberapa situs pemerintahan yang tidak dapat diakses dan juga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government di Provinsi Sumatera Barat berada pada tahap persiapan atau pematangan
2.	Yordan Putra Anggana/Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang (Jurnal Administrasi Publik, Vol 3,No.1 Hal 80-88	Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat pada masa sekarang, sehingga teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang, seperti teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan setiap masyarakat untuk kebutuaahn sehari-hari. Oleh karena itu,

		<p>pemerintah mengambil peluang menciptakan pelayanan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut <i>e-government</i>. konsep <i>e-government</i> adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat <i>good governance</i>. Dimana semua aspek-aspek yang terkandung dalam <i>good governance</i> tercermin dalam <i>e-government</i>. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Lokasi yang menjadi titik perhatian peneliti adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian <i>e government</i> Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah diterapkan selama lima tahun dan <i>e government</i> berada pada tingkat persiapan. Upaya yang dilakukan adalah Dinas Koperasi dan UKM adalah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dari Dinas Kominfo, mengadakan tenaga kerja kontrak dan pembuatan aplikasi <i>database</i> koperasi. Peneliti menawarkan sebuah gagasan yaitu aplikasi <i>website</i> dan proses pemberian pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan <i>e government</i> yang diinginkan dan tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat maupun <i>stakeholders</i> secara cepat dan tepat.</p>
2.	Risnandar/Analisis <i>e-Government</i> Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan	Bentuk penerapan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah

<p>Informatika Provinsi Sulawesi Tengah (e-Jurnal Katalogis, Volume 2, Nomor 7, Tahun 2014, hal 192-199</p>	<p>cukup baik. Menurut teori Indrajit (2002) ada beberapa hal yang sudah cukup baik seperti Modal dan <i>Content Development</i> dan <i>Connectivity</i> walaupun masih perlu perbaikan. Yang dianggap kurang memadai adalah <i>Competency Building</i> dan <i>Citizen Interfaces</i>. Sedangkan <i>Cyber Laws</i> tidak dinilai karena bersifat nasional sehingga yang perlu memperbaikannya adalah Pemerintah Pusat. Secara garis besar, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi seksi <i>e-Government</i> ada dua hal. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kerja pada Seksi <i>e-Government</i> seperti <i>Server</i>, komputer dan <i>website</i> dari Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang. Yang kedua adalah ketersediaan Sumber Daya manusia khususnya yang berlatar belakang IT dan tenaga teknisi untuk mengurus administrasi dan pengolahan informasi digital. Guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh seksi <i>e Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya yang pertama adalah upaya pengadaan dan permintaan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana penunjang kerja seksi <i>e-Government</i>. Yang kedua adalah menyampaikan pada sekretariat yang akan diteruskan pada Badan Kepegawaian Daerah untuk menyediakan</p>
---	--

		tenaga teknis dan IT untuk pengolahan informasi elektronik dan administrasi.
3.	Joko Tri Nugraha/ <i>E-Government</i> Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan <i>e-Government</i> Di Pemerintah Kabupaten Sleman) (Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media Volume 2 Nomor 1 April 2018)	Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-government. Di tingkat nasional, sudah banyak pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk mengimplementasikan e-government. Meski demikian, kondisi di lapangan menemukan perbedaan yang terjadi antar daerah dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. E-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan tanpa disertai peningkatan kualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan dari 28 pengelola web OPD di Kabupaten Sleman, teknik analisis data menggunakan teknik flow model analysis.
4.	Ririn Pratama,dkk/Penerapan E-Government dalam mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone (Fisipublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 november 2019)	Penelitian ini membahas tentang penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di kabupaten Bone yaitu, Capacity, adalah berupa kesiapan SDM melalui pelatihan yang terstruktur, selanjutnya Support, yaitu berupa dana setiap tahunnya untuk memfasilitasi setiap bidang yang ada di dinas kesehatan, kemudian Value, adalah berupa manfaat dari aplikasi tersebut yaitu perkembangan, data-data, dan perencanaan kerja, selanjutnya yaitu penyedia layanan, meliputi Dinkes kabupaten Bone yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan kartu JKN dengan syarat kartu keluarga untuk pengurusan kartu, kemudian penerima layanan, yaitu meliputi pengguna aplikasi yang sangat dimudahkan, karena masyarakat yang tidak memiliki kartu fisiknya, mereka masih tetap bisa berobat dengan menggunakan mobile JKN dengan aplikasi pintar tersebut</p>
--	--

2.2. Penelitian yang telah dilaksanakan

Penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya tidak terkait dengan implementasi good governance era pandemi covid, akan tetapi lebih banyak pada persoalan politik pengelolaan sumber daya alam, dengan melihat juga implementasi good governance terkait dengan pengelolaan tambang emas di beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Adapun penelitian yang telah dilakukan adalah :

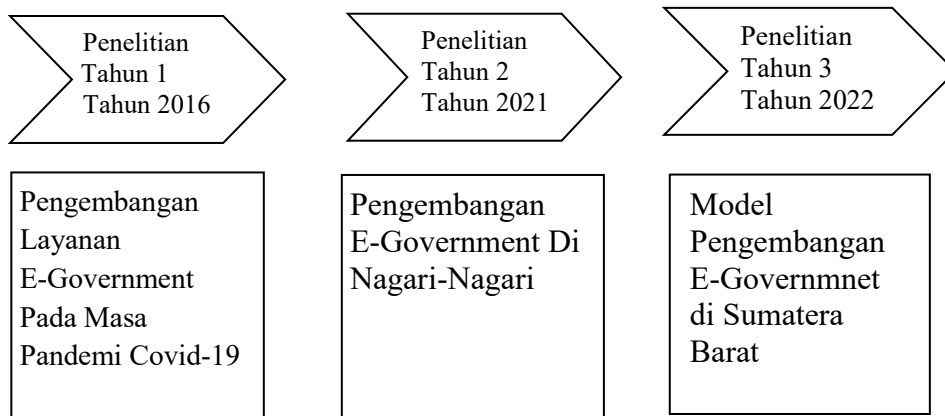
- a. Penelitian tahun 2016 tentang Optimalisasi penerapan politik pengelolaan sumber daya alam terhadap potensi konflik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yang telah dimuat dalam Proceeding Seminar Nasional II FISIP Unand ISBN : 978-602-71540-6-3

- b. Penelitian tahun 2016 tentang Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dipresentasikan pada Semnas III FISIP tanggal 10 Mei 2017
- c. Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan *Good Mining Practice* Di Provinsi Sumatera Barat yang telah dimuat dalam Jurnal Pembangunan Nagari Balitbag Provinsi Sumatera Barat ISSN : 2527-6387 (online) Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 dan sudah dipresentasikan pada Seminar Internasional ICCE (*international Conference on Civic Education*) tanggal 2-5 Oktober 2017
- d. Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung yang sudah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan III pada Bulan Desember 2017 dan sudah diterbitkan pada Jurnal Agrotropical Vol 7 Nomor 2 Desember 2017 dengan ISSN : 1829-8656
- e. Penerapan *Good Mining Practice* Pada Pertambangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (Ijm) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan IV pada Bulan Desember 2018 dan sudah di akan dimuat dalam e-proceeding FISIP Reseach Day tahun 2019
- f. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan telah diterima dan akan dimuat dalam Jurnal Warta Andalas Volume 25 Edisi ke 4 Desember 2018
- g. Pola Kekerasan Dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat (Studi Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman). Telah di presentasikan dalam seminar Internasional,yaitu IC-ASEAN pada bulan September 2019 dan juga telah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan V pada Bulan Desember 2019

2.3. Road Map Penelitian

Berikut akan diuraikan *roadmap* penelitian yang telah peneliti susun untuk 3 tahun kedepannya, yang dimulai tahun 2020 dan berakhir tahun 2022 sesuai dengan Gambar 1.

Gambar 1. Road Map Penelitian 2020-2022



2.4. Kerangka Teoritis

a. Konsep Good Governance

United Nations Development Programme (UNDP, 1997, h.5) mendefinisikan *good governance as the exercise of political, economic, and administration authority in the management of a country's affairs at all levels* (Pemerintahan yang baik sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan urusan negara di semua tingkatan). UNDP (1997, h.13) memaparkan ada 9 (Sembilan) karakteristik dari *good governance*, diantaranya adalah 1) Partisipasi, 2) Aturan Hukum, 3) Keterbukaan, 4) Kepekaan, 5) Musyawarah Mufakat, 6) Keadlian, 7) Efektif dan Efisien, 8) Akuntabilitas Publik, 9) Visi Strategi.⁷

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, di mana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu keberhasilan pada era reformasi pasca lengsernya rezim orde baru tahun 1999.

⁷ Yordan Putra Angguna. *Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 3, No.1 Hal 80-88

b. Konsep Electronic Government

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Secara garis besar pengembangan *Elektronik Government* di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu: 1) *Tingkat persiapan* yang meliputi: a) Pembuatan situs informasi di setiap lembaga; b) Penyiapan SDM; c) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll; d) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. 2) *Tingkat pematangan* yang meliputi: a) Pembuatan situs informasi publik interaktif; b) Pembuatan antarmuka keterhubungan antar lembaga lain. 3) *Tingkat pematapan* yang meliputi: a) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. 4) *Tingkat pemanfaatan* yang meliputi: a) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (*Government To Government*), G2B (*Government To Business*) dan G2C (*Government To Citizen*) yang terintegrasi⁸.

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2004: 15), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1) *Support*

Elemen *support* adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-government*. perlu dukungan atau biasa disebut *political will* dari pejabat publik agar konsep *e government* dapat diterapkan. Tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat terlaksana. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: a) Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi. b) Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

⁸ *ibid*

2) *Capacity*

Elemen *capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu: a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*. b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*. c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3) *Value*

Elemen *value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya.

Adapun elemen sukses pengembangan *egovernment* lain yang dikemukakan oleh Moon (2008, h.168) di dalam buku Sistem Informasi Manajemen karya Eko Nugroho yaitu *willingness* dan *local culture*. *Willingness* adalah kemauan. Kemauan di sini dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan sesuatu hal. Persepsi masyarakat akan ICT akan mempengaruhi kemauan menggunakan fasilitas ICT (Stevanus Wisnu.W, 2005, h.3). Faktor *willingness* tersebut dapat terlihat dari adanya pengaruh *willingness* pada *e-readiness* terhadap keberhasilan *e-government*. *Local Culture* Selain itu, faktor atau elemen sukses penerapan *e-government* juga dapat dipengaruhi oleh *local culture* atau budaya lokal yang mempengaruhi di dalam kesuksesan penerapan *e-government* terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronik. Begitu juga dengan kesiapan dari masyarakat pengguna, dimana berhubungan dengan kemampuan masyarakat di dalam menggunakan fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan *e-government* tersebut. Peran masyarakat di sini sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian kesuksesan penerapan *e government* (Nugroho, 2008: 168).

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Secara garis besar, tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Tahap Perencanaan, di mana kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan asumsi penelitian, menentukan lokus penelitian dan menyusun rencana penelitian. *Kedua*, Tahap pelaksanaan penelitian, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder dan analisis data. *Ketiga*, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka hasil penelitian akan dilaporkan ke LPPM unand, dalam bentuk hard dan soft copy nya.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang obyek penelitian yang dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam (*in deep interview*) terhadap semua subyek (para aktor/kelompok) yang merepresentasikan komponen dalam penelitian ini. Pencarian dokumen juga dilakukan dalam penelitian ini. Berhubung karena masih masa pandemi covid maka peneliti juga akan menghubungi dan mewawancarai informan melalui telp/wa/email

3.3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah institusi, yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari beberapa stakeholder.

3.4. Lokasi Penelitian

Peneliti perlu membatasi lokasi penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat

3.5. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*; artinya subyek yang akan dijadikan informan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan informan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kategori dan criteria informan penelitian

	Kategori Informan	Alasan/Pertimbangan Kriteria Informan
1	Gubernur/wakil gubernu/sekda/asisten bagian hukum dan pemerintahan Provinsi Sumar	Mempresentasikan pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah pemerintahan dan diamanahkan untuk mengurus persoalan inovasi pengembangan e-government
2	Pimpinan/Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat	Merepresentasikan kepentingan rakyat khususnya di Komisi yang menangani Bidang Pembangunan
3	Pimpinan SKPD (Dinas, Badan atau Kantor, Pol PP Provinsi Sumbar	dipilih secara <i>purposive</i> merepresentasikan instansi yang melakukan implementasi aturan tentang e-government
4	LSM/Ormas/Akademisi	LSM/Ormas yang konsen dalam e-government

5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumentasi; teknik ini digunakan untuk mencari data yang terkait dengan dokumen, laporan-laporan/temuan, risalah-risalah, jurnal atau buletin, berita media terkait dengan topic penelitian
- b. Wawancara mendalam (*depth interview*); teknik ini digunakan untuk mencari informasi yang mendalam dari subyek penelitian terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Observasi terkait objek penelitian

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data sekunder dan primer dilakukan dengan dua tahapan waktu. *Pertama*, pada saat bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data berlangsung; dan *kedua*, dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Bogdan, 1982). Tahapan pertama dilakukan untuk mencari fokus serta untuk memperoleh data-data awal dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan selama di lapangan. Sedangkan analisis yang kedua berfungsi untuk mengantisipasi berbagai temuan yang layak dieksplorasi lebih mendalam setelah data terkumpul. Rangkaian alur ini ditempuh agar analisis data dapat dilakukan secara komprehensif serta mampu mengaktualisasikan antara tujuan dan sasaran penelitian dengan berbagai kenyataan yang berkembang di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Pertama-tama data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, artikel dan sebagainya kemudian diatur, diurutkan, diorganisasikan, dikode dan dikategorikan ke dalam satu pola, secara sistematis dan kemudian diinterpretasikan.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penilaian data pada penelitian ini menggunakan metode *triangulasi* yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁹ Teknik *triangulasi* yang dipakai adalah *triangulasi sumber data* artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informan seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya.

⁹ Lexy J Moleong. 2010 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Jenis pekerjaan	Biaya yang diusulkan (Rp)
Honor Tim Peneliti (30 %)	4.440.000
Bahan Habis Pakai (60%)	6.080.000
Perjalanan (40%)	3.000.000
Biaya sewa operasional Lainnya (40 %)	1.500.000
Jumlah	15.020.000

4.2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyelesaian administrasi penelitian	■					
2	Pengurusan perizinan	■	■				
3	Penyusunan Instrumen Penelitian		■				
4	Pengumpulan Data Sekunder dan Primer			■	■		
5	Kompilasi dan Analisis Data serta penyusunan laporan kemajuan					■	
6	Monev						■
7	Penyusunan dan penyerahan Laporan Akhir						■
8	Pengiriman artikel						■

BAB 5. HASIL PENELITIAN

5.1. Pengantar

Pandemi *Covid 19* yang mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Kebijakan pemberlakuan *Lockdown* (Karantina Wilayah) dan *Social Distancing* (Pembatasan Sosial) diberlakukan oleh negara-negara di dunia yang terkena dampak pandemi *COVID-19*. Pemberlakuan kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat berinteraksi secara langsung satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko penularan *COVID-19* yang sangat mudah menular antar satu orang ke orang lain. Pembatasan interaksi tersebut menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat mempertahankan caracara konvensional untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mau tidak mau harus beralih kepada penggunaan media online¹⁰.

Sejak dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada tanggal 31 Maret 2020, beberapa wilayah di tanah air memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan sekolah dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan atau ibadah bersama dibatasi dan kegiatan-kegiatan di tempat umum atau fasilitas publik juga dibatasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan banyak orang agar resiko penularan virus ini dapat ditekan. Pemberlakuan Pembatasan Sosial di Indonesia juga membawa dampak pada aksesibilitas pelayanan publik. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini memberlakukan *work from home* (bekerja di rumah) secara bergantian bagi para pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini mempengaruhi aksesibilitas pelayanan publik. Pelayanan secara konvensional yakni dengan bertatap muka secara langsung mulai dibatasi jumlahnya dan selebihnya dibantu oleh sistem secara *online*. Pelayanan secara *online* ini merupakan hasil penerapan dari *E-Government*.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat juga merespon kebijakan pusat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi kerumunan dan interaksi masyarakat

¹⁰ Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. *Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi*. Jurnal Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–2781 Online

secara langsung, terutama pada tempat-tempat publik, termasuk pada aspek pelayanan publik. Di mana selama ini pada banyak organisasi pemerintah daerah masih melakukan interaksi langsung kepada masyarakat, maka era pandemi ini dilakukan perubahan pelayanan berbasis *online*.

5.2. Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19

Merespon Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan Daerah Nomor. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE ini merupakan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada instansi pemerintahan. Dalam proses pelaksanaan SPBE pada institusi pemerintahan difokuskan pada tiga domain utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya yaitu domain tatakelola, layanan dan kebijakan SPBE.

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar dalam merealisasikan perda tersebut juga menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dengan berbagai aplikasi layanan berbasis *online*. Apalagi di masa pandemic ini tentu pelayanan berbasis elektronik sangat dibutuhkan untuk mengurangi penambahan angka kasus Covid-19 dengan cara melakukan pembatasan sosial berskala besar. Adapun prioritas pelayanan yang diberikan adalah pada pelayanan dasar, seperti pelayanan kesehatan, percepatan ekonomi, pendidikan, kependudukan dan capil, termasuk pada pelayanan administratif pemerintahann. Khususnya pada pengurusan perizinan yang berbasis aplikasi, pengurusan surat menyurat, kegiatan lelang dan pada saat ini sudah tersedia 126 aplikasi pelayanan yang dikembangkan oleh Kominfo Sumbar

Di masa pandemi covid 19 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Carona Virus Disease* 2019. Khusus dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana terdapat pada pasal 75 disebutkan bahwa :

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. Peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.

Jadi jelas bahwa pelayanan publik pada masa pandemi ini mengutamakan pelayanan berbasis elektronik. Perda AKB ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran bersama dalam pencegahan dan pengendalian penularan covid dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Perda ini juga memberi kepastian hukum bagi aparatur pemerintahan daerah, khususnya dalam mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di ruang-ruang publik

Respon lain dalam pengembangan layanan *e-government* di Pemerintahan Provinsi Sumbar dengan membuat aplikasi OnSmart berbasis Android dan mengintegrasikan NIK dengan database kependudukan Sumatera Barat. Onsmart Dirancang sesuai kebutuhan masyarakat agar mempermudah masyarakat untuk mencari, dan mendapatkan informasi secara tepat, cepat dan Lengkap. OnSmart dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan 15 Tenaga Ahli pengembang e-Government. Konsep dan program digital tersebut tidak saja dibuat pada aspek pelayanan saja akan tetapi juga dibuat pada aspek e-pokir yang akan dibuat menjadi e-planning, termasuk juga soal anggaran. Akan tetapi memang masih terkendala pada aspek menu di aplikasi, di mana semuanya itu masih menggunakan Peraturan Gubernur dan ada rencana untuk ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Konsep dan program digitalisasi pembuatan webside tersebut, menggunakan anggaran yang tidak sedikit karena melibatkan aspek sumber daya manusia (SDM) yang hnadal, maka masing-masing OPD diberikan kebijakan yakni untuk tahun untuk kebutuhan pokok, khusus komunikasi dan informasi dianggarkan sebesar 7,2 milyar¹¹.

Di samping itu untuk memantau semua aplikasi e-Government yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar juga meluncurkan Command Center, sekaligus sebagai langkah awal bagi pembangunan Smart Province secara keseluruhan. Dengan Command Center diharapkan dapat mengendalikan provinsi ini cukup dengan teknologi, bisa berkomunikasi dengan 19 Bupati dan Walikota se-Sumbar dan melihat langsung *in real time* di lokasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi

¹¹ <https://www.gardaasakota.com/2017/11/dprd-dan-diskominfotik-ntb-pelajari.html>

dan informasi tersebut juga perlu diimbangi literasi digital dan edukasi. Dengan adanya Command Center, Diskominfo bisa memantau semua kegiatan yang ada di Sumbar, termasuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Semua kegiatan Pilkada 2020 bisapantau dari sini. Petugas maupun anggota di lapangan bisa melakukan *live report* (*red*-laporan langsung) dengan video streaming ataupun video conference, memberitahukan situasi keamanan atau proses pentahapan Pilkada serentak di Sumbar. Jangan sampai teknologi tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, karena ini jelas bisa dilihat, seperti contoh, menyebarkan berita hoax dan SARA yang menyesatkan sehingga merugikan pihak-pihak lain. Command Center dapat meringankan tugas seorang kepala daerah, apabila terkoneksi dengan satelit, bisa melihat progres pembangunan Sumbar. Untuk itu semua pihak harus bekerja sama untuk menanggulangi masalah tersebut dan mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Command Center merupakan langkah awal dalam rangka mewujudkan Sumbar sebagai *smart province*, juga untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Command center memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan modern. Sebagai penyedia informasi dari pemerintah, juga sebagai alat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sumbar *smart province* bisa memantau semua aktivitas kegiatan dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif atau *good governance*. Tentu saja butuh dukungan dari semua pihak, sekaligus dapat mensinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik OPD di lingkungan Pemprov Sumbar sehingga gerak dan arah pembangunan menuju *smart province* semakin cepat dan terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Sumbar¹²

Tidak dipungkiri juga bahwa ada beberapa kekurangan dalam upaya pengembangan layanan berbasis elektronik. Kendala utama dalam pelaksanaan *e government* adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia diberbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telkomunikasi juga masih mahal. Harapannya hal tersebut bisa diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet, terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lainnya dengan item pelayanan yang sama. Secara khusus di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa kendala

¹²<https://www.sumbarfokus.com/berita-menuju-sumbar-smart-province-diskominfo-luncurkan-command-center.html>

dalam pengembangan layanan e government, berikut akan dijelaskan : *Pertama*, Sumbar masih minim pembangunan infrastruktur IT. Pembangunan teknologi informatika masih berpusat pada daerah perkotaan, sementara ada banyak daerah-daerah yang justru belum dapat dijangkau oleh jaringan internet, sehingga ini tentu saja menyulitkan dalam pengembangan *e-government*. *Kedua*, kualitas SDM atau aparatur dalam pengoperasian IT masih rendah. Sehingga secanggih apapun aplikasi yang dibuat, namun bagi yang mengoperasikan masih gagap teknologi, pelayanan tetap berjalan kurang efisien dari segi waktu dan kualitas pelayanan. *Ketiga*, persoalan yang ada juga disebabkan karena masih belum maksimal anggaran yang dialokasikan untuk IT. Apapun bisa dilakukan: pembangunan dan percepatan infrastruktur IT serta peningkatan SDM dalam pengoperasian IT, jika ada anggaran yang cukup untuk itu. *Keempat*, belum maksimalnya integrasi sistem antar OPD, sejauh ini, setiap OPD memiliki server tersendiri dengan kapasitas dan bentuk pelayanan yang berbeda-beda. Dengan ini kedepannya akan diintegrasikan dalam satu server atau jaringan dalam lingkungan pemerintah sumbar melalui website resmi pemerintah.

Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintahan Dearah Provinsi Sumbar dalam mengembangkan layanan e government, misalnya dengan memanfaatkan perguruan tinggi yang memiliki prodi IT sebagai leading sektor dalam pengembangan layanan tersebut, di samping itu juga bisa memanfaatkan provider telekomunikasi untuk mengembangkan layanan jaringan mereka sampai ke pelosok-pelosok nagari di Sumatera Barat, sehingga harapannya tidak ada lagi nagari-nagari yang belum memeiliki jaringan internet. Dengan demikian seluruh jenis pelayanan bisa diberikan pada masyarakat tanpa masyarakat harus mengeluarkan biaya transfortasi yang banyak, karena pelayanan sudah bisa didapatkan di kantor wali nagar/kelurahan masing-masing

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pengembangan layanan e government era pandemi covid mesti dilakukan oleh Pemerintah daerah, di samping untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, juga untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penularan covid 19, karena dengan pelayanan yang diberikan secara konvensional, di mana dengan adanya pertemuan langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan akan beresiko dalam penularan covid 19. Oleh sebab itu, pemberian layanan mesti dilakukan dengan berbasis online dan harus menjangkau pada semua jenis pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis meyarakan :

- a.** Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat mesti mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan IT, termasuk juga dalam pembangunan infrastruktur IT, pengembangan SDM pengelola
- b.** Masyarakat harus membiasakan diri dan melek teknologi, sehingga ketika pelayanan yang diberikan berbasis IT, maka masyarakat juga harus bisa memanfaatkannya dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, dkk. (2003) *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Culla, Suryadi A. (2005) *Good Governance, Otonomi dan Pilkada*. Fajar On Line
- Hartono, D.U. dan Mulyanto, E.2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web*. Jurnal Teknologi Informasi
- Ichardus, Eko Indrajit. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nugraha, Joko Tri. 2018. *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan e-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media Volume 2 Nomor 1 April 2018
- Moleong, J Lexy. 2010 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moon, M. J. 2002. The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>
- Nugroho,R. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Perda No.20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Anggana, Yordan Putra. *Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 3,No.1 Hal 80-88

LAMPIRAN

1. Justifikasi anggaran

1. Biaya Honor Tim Peneliti				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Jumlah (Rp)
Ketua	25.000	6	12	1.800.000
Anggota 1	15.000	6	12	1.080.000
Anggota 2	15.000	4	10	600.000
Anggota 3	15.000	4	8	480.000
Anggota 4	15.000	4	8	480.000
Sub Total (Rp)				4.440.000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas HVS	Rim	3	35.000	105.000
Cartridge	unit	2	250.000	500.000
Materai 6000	unit	10	6.000	60.000
ATK	Paket	1	150.000	150.000
Dokumen keeper	unit	2	50.000	100.000
Map Plastik	unit	5	15.000	75.000
Jilid laporan	unit	10	15.000	150.000
Map Kertas	unit	5	2.500	12.500
Kertas Foto	unit	1	45.000	45.000
Konsumsi	Paket	20	50.000	1.000.000
Tas Peneliti	unit	5	150.000	750.000
Biaya Fotocopy	Lembar	500	125	62.500
Paket internet	Paket	5	200.000	1.000.000
Bahan referensi	Paket	1	1.500.000	1.500.000
Pulsa	Paket	5	500.000	500.000
Hekter	unit	1	10.000	10.000
Sub Total (Rp)				6.080.000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Transportasi ke lokasi penelitian	Survey dan pencarian data data	20	150.000	3.000.000
Sub Total (Rp)				3.000.000
4. Lain-Lain				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Biaya seminar nasional	Paket	1	1.000.000	1.000.000
Biaya Publikasi	Paket	1	500.000	500.000
Sub Total (Rp)				1.500.000
Total anggaran yang diperlukan				15.020.000

2. Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi waktu (jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si/00281081009	Ilmu Politik/ FISIP	Politik Lokal dan Otonomi Daerah/Manajemen dan Resolusi Konflik	5/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan 5. Membuat Finishing Laporan akhir 6. Mempresentasi kan hasil penelitian
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	Admini strasi Publik/ FISIP	Administras i Publik	5/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan
3	Didi Rahmadi,MA	Ilmu Politik/ FISIP	Ilmu Politik	4/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke

					lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan
4	Andre Gunawan	Ilmu Politik/ FISIP	Ilmu Politik	4/8	1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan
5	Tika Yuniarty	Ilmu Politik/ FISIP	Ilmu Politik	4/8	1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan

3. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dewi Anggraini,S.IP,M.Si
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	N I P	198110282010122004
5.	NIDN	0028108109
6.	Tempat/Tanggal Lahir	Koto Tuo/28 Oktober 1981
7.	email	Dewianggraini_81@yahoo.com
8.	Nomor Telepon/HP	085271811756
9.	Alamat Kantor	Gedung FISIP, Kampus UNAND, Limau Manis, Padang
10.	Nomor Tel/Faks	(0751) 71266
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 40 Orang
12.	Mata Kuliah Yang Pernah Diampu	<ol style="list-style-type: none">1. Manajemen dan Resolusi Konflik2. Politik dan Birokrasi3. Sistem Perwakilan Politik4. Birokrasi di Indonesia5. Reformasi Birokrasi6. Korupsi dan Politik7. Sistem Pemerintahan Desa dan Nagari8. Politik Pemerintahan Desa dan Nagari9. Pembangunan Regional dan Otonomi Daerah10. Komunikasi Politik11. Gender dan Gavernance12. Legal Drafting13. Perempuan dan politik14. Pembangunan Partisipatif15. Pengantar Ilmu Pemerintahan16. Sistem Politik indonesia17. Integrasi Politik18. Integritas dan Anti Korupsi19. Kewarganegaraan20. Pancasila21. Etika Politik22. Pengantar Filsafat Ilmu

		23. Good Governance and Clean Governmnet
--	--	--

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Andalas	-
Bidang Ilmu	Ilmu Politik	PWD/Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah	-
Tahun Masuk-Lulus	1999-2004	2006-2008	-
Judul Skripsi/Thesis	Proses Pembuatan Kebijakan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	Formasi Gerakan Petani dalam Merebut Lahan yang dikuasai oleh Balai Pembibitan ternak unggul sapi potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan respon Pemerintah Lokal	-
Nama Pembimbing	1. Drs. Bakaruddin Rasyidi, MS 2. Drs. Syaiful M.Si	Prof. Dr. Afrizal, MA Drs. Bakaruddin Rasyidi, M.S	-

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2019	Pola Kekerasan Dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat (Studi Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman).	BOPTN	29.000.000
2.	2019	Kajian Keamanan Kampus Unand	BOPTN	10.000.000
3.	2018	Penerapan <i>Good Mining Practice</i> Pada Pertambangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (Ijm) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	BOPTN	30.000.000
4.	2017	Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya	PNBP	12.000.000

		Terhadap Pelaksanaan <i>Good Mining Practice</i> Di Provinsi Sumatera Barat		
5.	2016	Respon pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	DIPA FISIP	8.000.000
6.	2016	Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung	DIPA Unand	12.500.000
7.	2015	Politik uang dalam pemilihan umum 2014 di Kota Padang	DIPA Unand	7.000.000
8.	2014	Respon Pemerintahan Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan Petani Di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota Dalam Merebut Lahan Yang dikuasai Oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas	DIPA Unand	12.500.000,-
9.	2013	Optimalisasi Penerapan Pakta Integritas (PI) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Aparatur Pemerintahan Dan Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Dharmasraya, kota Pekanbaru dan Kota Medan)	Dikti	50.000.000,-
10.	2013	Desentralisasi dan Pembangunan Demokrasi Lokal : Studi tentang Model Partisipasi Masyarakat dan Daya Tanggap Pemerintahan Nagari Lasi” tahun 2013	DIPA Unand	7.500.000
11.	2010	Mekanisme Sitem Politik Kota Padang (Studi Penyaluran Aspirasi Politik Pedagang Relokasi Pasar Raya Padang)	DIPA Unand	7.500.000
12.	2010	Formasi Gerakan Petani dalam Merebut Lahan yang dikuasai oleh Balai Pembibitan ternak unggul sapi	Penelitian Mandiri	5.000.000

		potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan respon Pemerintah Lokal		
--	--	--	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2019	Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Organisasi Bagi Pengurus Bank Sampah Unit (BSU) Andalas Sepakat	DIFA Fakultas	3.500.000
2.	2019	Pelatihan Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Lokal di Kelurahan LimauManis Selatan, Kecamatan Pauh, Padang	BOPTN	10.000.000
3.	2018	Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Pengurus OSIS SMP Negeri 31 Padang	DIPA Fakultas	3.500.000
4.	2018	Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung	BOPTN	10.000.000
5.	2018	Pelatihan Penguatan Organisasi Lokal Masyarakat di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang	BOPTN	10.000.000
6.	2017	Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung	BOPTN	10.000.000
7.	2017	Pelatihan Penguatan Nili-Nilai Integritas Pemilu Bagi Kader PSI Di Kota Padang	DIPA Fakultas	3.500.000
8.	2017	Peningkatan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Nagari Limau Manis Lambung Bukit	BOPTN	10.000.000
9.	2016	Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Pengurus Organisasi Santri Intra Pondok Pasantren (OSIPP) Pondok Pasantren Nurul Yaqin Ambung	DIPA Fakultas	3.000.000

		Kapur Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman"		
10.	2016	Pendidikan Politik Kepada Pelajar SMA di Kota Padang	DIPA Unand	5.000.000
11.	2015	Pendidikan Politik Bagi Santri Pemilih Pemula di Pondok Pasantren Salafiyah Nurul Yaqin Ambung Kapur Kab Padang Pariaman	DIPA Unand	5.000.000
12.	2015	Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai	DIPA Unand	5.000.000
13.	2014	Pengabdian Masyarakat Berbasis Prodi Ilmu Politik ke Dinas Pendidikan Solok Selatan, Rabu 12 November 2014 di SMP 12 Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan	DIPA Unand	5.000.000
14.	2013	Pelatihan Dan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik Kritis Pada Pemilih Pemula Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Yang Berkualitas Pra Pilkada Padang Tahun 2013	DIPA Unand	5.000.000
15.	2013	Peningkatan Kapasitas Caleg Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif tahun 2014	DIPA FISIP	5.000.000
16.	2012	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru-Guru SMUN 11 Padang	DIPA UNAND tahun 2012	5.000.000,-
17.	2011	Partisipasi politik perempuan di tanah datar	DIPA UNAND tahun 2011	5.000.000,-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/No/Tahun	Nama Jurnal
1.	Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Sosial Politik Petani di Sumatera Barat	Vol 11/No 2/ Desember 2012 ISSN; 1412-436X	Jurnal Al-Risalah
2.	Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaran Ham Dalam Konflik Agraria Antara Masyarakat Mungo Versus Bptu Sp Padang Mangatas	ISSN:2089-2179. Volume 2. Nomor 6 tahun 2016)	Jurnal Analisis Politik

3.	Jurnal Agrotropical sebagai penulis kedua dengan Judul "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dengan Metode Bank Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Barat	ISSN 1829-8656/Vol.5-No. 2 Desember 2015	Jurnal Agrotropical
4.	Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas "Penguatan Ilmu Sosial Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa" dengan judul : OPTIMALISASI PENERAPAN POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG (ISBN;978-602-71540-6-3/28-29 September 2016)	ISBN: 978-602-71540-6-3/2 8-29 September 2016	Prosiding Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas
5.	Konfrensi Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI)" Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa" dengan Judul : Respon Pemerintahan Lokal Terhadap gerakan Perlawanan 300 KK Petani di Nagari Mungo Dalam Merebut Lahan Yang dikuasai Oleh BPTU SP Padang Mangatas (ISBN:978-602-99467-1-0/Jil 1/18-19 Mei 2016)	ISBN: 602-99467-1-0/Jil 1/18-19 Mei 2016	Prosiding Konfrensi Sosiologi Indonesia (APSSI) V
6.	Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan <i>Good Mining Practice</i> di Provinsi Sumatera Barat pasca Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	ISSN : 2527-6387 (online) Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017	Jurnal Pembangunan Nagari
7.	Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung	Vol 7 Nomor 2 Desember 2017 dengan ISSN : 1829-8656	Jurnal Agrotropical
8.	Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung	Vol 25 No.2 tahun 2018	Jurnal Warta Andalas

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	ICED-QA 2	Implementation of Problem Based Learning and inquiry Learning Method on Bureaucratic and Political Subject	Padang, 5 September 2019
2.	IC-ASEAN	Pattern of Violence in Mining Conflict in West Sumatera (study in Psaman Regency and Solok Regency)	Padang, 5-6 September 2019
3.	KONFERENSI NIASIONAL KLASTER DAN HILIRISASI RISET BERKELANJUTAN (KN-KHRB) V 2019	Pola Konflik Pertambangan di Sumatera Barat (kasus Kabupaten Solok dan Pasaman)	Padang, Desember 2019
4.	International Conference On Educational Developme and Quality Assurance "l mproving Educational Quality Toward International Standard	"Implementation of Problem Based Learning (PBL) Method the Village/Nagari Government's Political Subject	Padang, Sepetember 2019
5.	KONFERENSI NIASIONAL KLASTER DAN HILIRISASI RISET BERKELANJUTAN	"Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Emas PT. Inexo Joya Makmur (IJM) Pasca Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan	Padang, Desember 2018
9.	"The chances of the formation of the Nagari as the Traditional Village In Accordance with Act No. 6 of the year 2014 in the West Sumatera" sebagai penulis ketiga	SKIM XV 2017 ISBN 978-602-439-335-9 April 2018 dengan judul artikel	Prosiding Symposium on Culture and Cooperation Between Indonesia-Malaysia 2017
10.	Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Pengurus OSIS SMP Negeri 31 Padang	Volume 2 Nomor 2 Juni 2019	Jurnal Ilmiah Nagari Membangun
11.	Pemanfaatan Modal Sosial Deri Asta dan Zohirin Sayuti Pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018	Volume 1 Nomor 1, April 2029	JIDL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 tahun Terakhir

	(KN-KHRB) IV 2018	Daerah"	
6.	KONFERENSI NASIONAL KLASTER DAN HILIRISASI RISET BERKELANJUTAN (KN-KHRB) IV 2018	"Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Pengurus OSIS SMP Negeri 31 Padang"	Padang, Desember 2018
7.	KONFERENSI NASIONAL KLASTER DAN HILIRISASI RISET BERKELANJUTAN (KN-KHRB) IV 2018	"Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung"	Padang, Desember 2018
8.	ICCE (<i>International Conference on Civic Education</i>)	Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pertambangan Yang Baik (<i>Good Mining Practice</i>) di Provinsi Sumatera Barat	Padang, 2-5 Oktober 2017
9.	Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan III	Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung	Padang, Desember 2017
10.	Konferensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan II	Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Padang, 5 Desember 2016
11.	Pemakalah pada Seminar Nasional FISIP II "Penguatan Ilmu Sosial Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa"	Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung	Padang, 28-29 September 2016
12.	Konferensi Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI)"	Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa" dengan Judul : Respon Pemerintahan Lokal Terhadap gerakan Perlawanan 300 KK Petani di Nagari Mungo Dalam Merebut Lahan Yang dikuasai Oleh BPTU SP Padang Mangatas	Padang, 17-19 Mei 2016

		(ISBN:978-602-99467-1-0/Jil 1/18-19 Mei 2016)	
13.	Pembicara dalam Acara Gebyar Knowledge Farmasi Unand	Talkshow : BPJS Solusi Jaminan Kesehatan Masa Kini	Padang, 15 oktober 2015
14.	Narasumber Pada Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Kepemimpinan Dalam Organisasi Penyelenggara Pemilu di Daerah	Padang Panjang, 6 Juni 2014
15.	Narasumber Pada Kegiatan Kaderisasi GMNI Cabang Padang	Membentuk Kader Bangsa sebagai Pelopor Marhaenisme Menuju Sosialisme Indonesia	Padang, 24-26 Februari 2012

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 5 Tahun Terakhir

No	Judul/tema	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-	-	-	-

J. Penghargaan yg Pernah Diraih 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental

Padang, 25 Juli 2020

Ketua,



Dewi Anggraini, S.IP,M.Si
NIP. 198110282010122004

Anggota Peneliti 1

Identitas Diri

Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
NIP/NIK : 19860514 201012 2 006
NIDN : 0014058601
Tempat /Tanggal Lahir : Koto Baru/ 14 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : III B/ Penata Muda Tk 1
Jabatan Fungsional Akademik : Asisten Ahli
Alamat Rumah : Jl. Muaro No. 217 Jr. Simpang, Nagari Koto Baru, Kec.
Kubung, kab. Solok
Alamat Email : wewen_kr@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2010	S2	Universitas Diponegoro	Administrasi Publik
2008	S1	Universitas Diponegoro	Administrasi Publik

PELATIHAN PROFESIONAL		
Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2012	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Gol III	LPMP Provinsi Sumatera Barat
2011	Pelatihan Metodologi Penulisan Proposal Pengabdian Masyarakat Program Mono Tahun	LPMP Universitas Andalas
2011	Pelatihan Metode Pembelajaran SCL	Jurusan Antropologi, FISIP, Univ. Andalas
2010	Pelatihan Penguasaan Kompetensi Pedagogik dengan Bobot Materi setara 400 menit	Fakultas Teknologi Pertanian, Univ. Andalas

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun...sd...
Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univ. Andalas	2013 - 2014
Tim Seleksi Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Peningkatan Akademik	FISIP, Univ. Andalas	2013
Pengelola Jurnal On Line FISIP	FISIP, Univ. Andalas	2012
Divisi Publikasi dan Penerbitan Labor Administrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univ. Andalas	2011
Sekretaris Tim Akreditasi Jurusan Adminitrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara	2011

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2017	Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Ketua	DIPA Fisip
2016	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang	Ketua	DIPA Universitas
2016	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Solok Selatan	Anggota	DIPA Universitas
2015	Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan dan investasi di kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M) Kabupaten Solok	Ketua	DIPA FISIP
2014	Analisis kebijakan investasi dalam memdorong pertumbuhan investasi di kabupaten solok	Anggota	DIPA FISIP
2013	Analisis Etika Publik dalam Kompetensi Pejabat Publik	Ketua	DIPA FISIP
2012	Abilitas Inspektorat dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ditinjau dari Disain Organisasi	Anggota	DIPA

KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	<i>Collaborative of Stakeholders in Formation and Development Nagari-Owned Enterpise</i>	Jurnal <i>Policy & Governance Revie</i> ; 2580-339w, Vo. 1, Issue 3 ISSN: 2580-3395 eSSN: 2580-4820 link: http://journal.iapa.or.id/pgr
2017	Analisis Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Prosiding Semnas Ilmu Administrasi Negara FIS UNP 2017 ISBN: 978-602-507000-0-6
2016	Analisis Implementasi Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada SMK di Kota	Prosiding Semnas Ilmu Administrasi II FIS UNP

	Padang	2016 ISBN: 978-602-72961-1-4
2016	Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)	Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP) Edisi Vol 2 N0 1 2016, hal 93-108 e-ISSN 2527-6476
2012	Nilai Budaya dalam <i>Human Governance</i>	<i>E- Proceeding Innovative Governance at ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference 2012.</i> e-ISBN: 978-602-203-444-5

PESERTA KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM		
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2017	Pemakalah pada “Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara FIS 2017”	Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP
2016	Pemakalah pada “Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara FIS UNP 2016”	Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP
2013	Pemakalah pada “Konferensi IAPA 2013 dan Kongres Pertama IAPA”	IAPA dan Univ. Indonesia
2012	Pemakalah pada “Seminar Internasional ASPA Indonesia dan Konferensi Tahunan IAPA 2012 dengan Tema Pemerintahan Inovatif”	IAPA dan Univ. Brawijaya
2011	Pemakalah pada “Simposium Hasil Penelitian dan Inovasi Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Kementrian Pendidikan Nasional”	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2011	Pemakalah pada “Konferensi Administrasi Negara/ Publik IV dan Seminar Nasional dengan tema Penguatan Administrasi Negara/ Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”	IAPA dan Univ. Hasanuddin
2011	Peserta pada “Seminar Sosialisasi Hasil Survei Nasional KPPOD 2011 Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Pembangunan Iklim Usaha di Indonesia”	KPPOD

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT			
Tahun	Judul Pengabdian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2017	Pelatihan teknik Analisis Dukungan Stakeholders dalam Pengambilan Keputusan Publik oleh Aparatur Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota PADang	Ketua	Dipa Fisip
2017	Pelatihan Pengembangan Aparatur di Kecamatan Pauh Kota Padang	Anggota	

2016	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara ke SMAN 1 Kota Jambi Provinsi Jambi	Anggota	Dipa Fisip
2015	Pelatihan Pelayanan Berkualitas bagi Aparatur Perangkat Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar	Anggota	Dipa Fisip
2014	Pelatihan Pengelolaan Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMAN 9 Kota Padang	Anggota	DIPA FISIP/ Rp. 5.000.000,-
2013	Diseminasi Kelompok pada Siswa SMA untuk Mewujudkan Kelompok-kelompok Belajar yang Efektif	Anggota	
2013	Pengenalan Konsep dan Aplikasi Model Implementasi Program dalam Rangka Meminimalisir Kegagalan Implementasi Program Pemerintah pada Aparatur Pemerintah Nagari di Nagari mungo Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Anggota	
2012	Sosialisasi Metode <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dalam Pembuatan Program Kerja Kec. Kubung, Kab. Solok	Ketua	DIPA Fakultas
2012	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Administrasi Negara di SMAN 1 Guguk Kab. 50 kota	Anggota	
2011	Pengabdian Jurusan Administrasi Negara di Kec. Kolok, Kota Sawah Lunto	Anggota	

Padang, 25 Juli 2020
Yang Menyatakan



Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si
NIP. 198605142010122006

DIDI RAHMADI, S.Sos., M.A.

CURRICULUM VITAE



I. IDENTITAS PRIBADI

12.	Nama Lengkap	Didi Rahmadi, S.Sos., M.A.
13.	Tempat/Tanggal Lahir	Belawan, 1 Januari 1982
14.	Bidang Ilmu/Spesifikasi	Ilmu Politik
15.	Alamat Rumah	Jl. Berlian II No. 81 Perumnas Pagambiran Lubuk Begalung, Padang
	HP	0813 60524701
	e-mail	didirahmadi@hotmail.com

II. PENDIDIKAN

2.1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

No	Tingkat	Nama Lembaga Pendidikan	Kota/Negara	Bidang Keahlian	Ijazah Th.
1.	Sarjana	Universitas Sumatera Utara	Medan	Ilmu Politik	2007
2.	Magister (S2)	Aligarh Muslim University	India	Ilmu Politik	2013

2.2. Seminar/Lokakarya/Workshop/Penataran/Pelatihan yang diikuti

No	Judul Kegiatan	Tahun	Sbg: Pelatih/ Fasilitator/Peserta/ Pembicara	Tempat
1.	Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas	2016	Pembicara	Padang
2.	Focus Group Discussion DKPP	2016	Narasumber	Padang
3.	Seminar & Bedah Buku: Tiga Sepilin, Surau Solusi untuk Bangsa	2016	Moderator	Padang
4.	Pre Departure PhD Training, Unand & Deakin University	2016	Peserta	Padang
5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Muda Indonesia, CEPP Link dan KPU Prov. Sumatera Barat	2015	Fasilitator	Padang
6.	Seminar Islam dan Mahasiswa UKM PHP Universitas Andalas	2015	Pembicara	Padang

III. PUBLIKASI, PENELITIAN

3.1. Daftar Karya Ilmiah, /artikel jurnal/karya seni// buku

No.	Judul Artikel/ Judul Bab	Nama Jurnal / Judul Buku	Tahun	Status (1)			Dipublikasikan Pada	Nama Lembaga/Sitasi (2)
				1	2	3		
1	Multikulturalisme dan Nasionalisme	Politik Kaum Muda	2017				Bab dalam Buku	
2	Ruang Pelanggaran Etik oleh Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Kades Serentak 2015	Problematika Pemilu Kades Serentak 2015	2016				Bab dalam Buku	
3	Relasi Negara dan Petani: Pengalaman Negara Maju dan Berkembang	<i>Prosiding Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas</i>	2016		√		Jurnal	
4	Kontribusi Sosial Muhammadiyah	<i>Jurnal Islam dan Demokrasi</i>	2015		√		Jurnal	

3.2. Pengalaman Penelitian

No.	Kegiatan	Sbg	Tahun
1	Pengaruh Modal Sosial Nagari dalam Implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di Kecamatan Pauh, Kota Padang	Asisten Peneliti	2016
2	Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi Sawit	Asisten Peneliti	2015
3	Survey Popularitas Kandidat Partai Golkar pada Pemilu 2014	Koordinator	2014
4	Penelitian Pemetaan Jaringan Kekekerabatan di Pulau Laut, Kalimantan Selatan	Peneliti	2013

IV. PENGALAMAN ORGANISASI DAN KERJA

4.1. Keikutsertaan dalam organisasi

No.	Nama Lembaga Profesi	Periode Waktu	Pengurus/ Anggota	Tingkat (Nas/ Intern.)
1.	Daulat Institute	2017-skrng	Direktur	Lokal
2.	Relawan Serikat Petani Indonesia Sumatera Barat	2016-skrng	Relawan	Lokal
3.	Alumni PPI Dunia	2014-skrng	Anggota	Nasional
4.	PPI India	2012-2013	Ka. Bidang Internal	Internasional
5.	Solidaritas Buruh Sumatera Utara	2008-2010	Anggota	Lokal

5.	HMI Cabang Medan	2006-2007	Anggota	Lokal
----	------------------	-----------	---------	-------

4.2. Pengalaman Kerja

No.	Nama Lembaga	Periode tahun	Tingkat (Lokal, Nasional, Intern-)
1	Tim Seleksi KPU Kota/Kabupaten Kota Pariaman, Padang Panjang	2018	Lokal
2	Tim Seleksi KPU Kota/Kabupaten Kota Solok, Solok Selatan	2018	Lokal
3	Staff Pengajar Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	2014-skrng	Lokal
4	Konsultan pada Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Unand	2013-2016	Lokal
5	Staff anggota pada Pusat Studi Pembangunan dan Politik Islam	2008-2010	Lokal

V. CAPAIAN PRESTASI

5.1. Pencapaian prestasi/reputasi

No	Prestasi Yang Dicapai*	Waktu Perolehan (Tgl/Bln/Th)	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
1.	Alumni Sekolah Kebangsaan dan Kebudayaan Maarif Institute	2018	Nasional
2.	Kader Bangsa Fellowship Program	2017	Nasional
3.	Utusan PPI India dalam SI PPI Dunia	2012	Internasional
4.	The Best Traditional Dance Group at Cultural Festival AMU, India, 2011	2011	Internasional

Padang, 25 Juli 2020
Yang menyatakan

Didi Rahmadi, MA

a. Identitas diri

1	Nama	Andre Gunawan
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	S1 Ilmu Politik
4	NIM	1710832010
5	Tempat dan tanggal lahir	Lawang, 20 Mei 1999
6	Email	andregunawanej@gmail.com
7	Nomor Telepon	081267724369

Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMA
Nama Institusi	SD N 08 Pc. Lawang	MTsN Matur	MAN 1 Kota Bukittinggi
Jurusan	-	-	Pendidikan Keagamaan
Tahun Masuk-Lulus	2005-2011	2011-2014	2014-2017

Pemakalah Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Penghargaan 10 Tahun terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun	Sumber Pendapatan
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Padang, 25 Juli 2020
Yang Menyatakan,

Andre Gunawan

a. Identitas Diri

1.	Nama	Tika Yuniarty
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Politik
4.	NIM	1710832016
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Cilodang, 01 Juni 1999
6.	E-mail	Tikayuniarty01@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	+628-2282428915

a. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMA
Nama Institusi	SD Negeri 180/11 Mulya Bhakti	SMP Negeri 1 Pelepat Ilir	SMA Negeri 1 Pelepat Ilir
Jurusan	-	-	IPA
Tahun Masuk-Lulus	2005-2011	2011-2014	2014-2017

b. Pemakalah Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional Kepemiluan Tahun 2019	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa (Studi Kasus terhadap Desa Cilodang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)	Selasa, 12 Noveber 2019 di Convention Hall Universitas Andalas
2.	-	-	-

c. Penghargaan 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun	Sumber Pendanaan
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

Padang, 25 Juli 2020
Yang Menyatakan,

Tika Yanuarti